

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan seperti berikut :

1. Kesesuaian pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana mati atas dasar kekeliruan dalam menerapkan hukum dan kekhilafan hakim dalam perkara tindak pidana psikotropika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39.PK/Pid.Sus/2011 dengan KUHAP. Alasan penggunaan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana/Pemohon ialah bahwa majelis hakim Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak berwenang menentukan berat ringannya pemidanaan yang menjadi wewenang *judex factie* . Hakim tingkat Kasasi (*judex juris*) tidak berwenang memberi penilaian yang bersifat fakta empiris, serta hakim tingkat kasasi (*judex juris*) dalam memutus tidak menerapkan/mencerminkan rasa keadilan jika dibanding dengan terdakwa lainnya terkait dengan perkara *a quo* yang telah diputuskan dalam pemeriksaan terpisah dengan putusan pidana yang lebih ringan. Sehingga penggunaan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim oleh Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali perkara Tindak Pidana Psikotropika pada putusan Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP mengenai permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, bahwa putusan Kasasi *judex juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana mati atas dasar kekeliruan menerapkan hukum dan kekhilafan hakim dalam perkara tindak pidana Psikotropika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39.PK/Pid.Sus/2011 sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP. Hal tersebut karena Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim yang mengarah pada putusannya ialah bahwa terkait dengan diperberatnya hukuman terhadap Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat

kasasi, Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai *Judex Juris* bukan *Judex Facti*, tidak berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, menambah hukuman yang bersifat pembedaan dari hukuman 15 tahun di tingkat pertama dan 18 tahun di tingkat banding, menjadi hukuman mati. Bahwa mengingat terdapat disparitas atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa pidana mati dengan hukuman 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada SUWARNO bin LAMIDJAN, tidak seimbang dan tidak adil, padahal kedua-duanya didakwa melakukan tindak pidana secara bersama, maka oleh karena itu hukuman MATI atas diri Pemohon Peninjauan Kembali ini haruslah dibatalkan. Karena Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c, selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali yaitu Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/ Pid.Sus/ 2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3412/ Pid.B/ 2006/ PN.SBY, tanggal 17 April 2006 dan menjatuhkan putusan berupa putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan daripada pidana mati, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai penggunaan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata oleh hakim sebagai alasan Terpidana dalam pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 masih terdapat kelemahan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *Judex factie* maupun *judex juris* pada saat mengkonstruksi putusan seyogyanya lebih teliti dan cermat memperhatikan fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung agar tidak menimbulkan atau membuka celah adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili seorang yang didakwa melakukan tindak pidana khususnya menyangkut perkara psikotropika yang berat, demi

- menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta tercapainya tujuan hukum bagi para pencari keadilan.
2. Penuntut Umum hendaknya dalam menuntut pelaku penyalahgunaan psikotropika atau narkotika dan zat adiktif lainnya, dengan tuntutan pidana maksimal dan menyiapkan alat-alat bukti yang memadai agar dapat menimbulkan efek jera bagi para terdakwa.
 3. Kepada para hakim baik *Judex factie* maupun *judex juris* hendaknya tidak menolak penerapan hukuman mati bagi para terdakwa yang terbukti sebagai produsen, bandar, pengedar psikotropika golongan I yang terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar Sitanggang. 1997. *Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- HMA Kuffal. 2003. *KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press
- Hamid, Hamrat. 2008. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Edisi Pertama*, Cetakan Enam, Jakarta: Penerbit:Sinar Grafika.

- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Laden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramli Zein, SH., MS. 2001. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, UIR Press, Pekanbaru
- RM. Suharto. 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Bepikir*, Bandung: Refika Aditama.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- William Baude. 2008. ”The Judgement Power”. *The Georgetown Law Journal*. Vol. 96, Nomor 6
- Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

JURNAL :

Arif Dwi Atmoko.2010. “Penanggulungan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika yang Ditangani Polwiltabes Surabaya”. *Jurnal Hukum* .Vol. XVIII.2010.

Dalbert, C. & Filke, E. 2007. *Belief in a just world, justice judgments, and their functions for prisoners*. Criminal Justice and Behavior, 34, 1516-1527

Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto. 2012. “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”. *Jurnal Pandecta*. Volume 7, Nomor 2, Juli 2012. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

William Baude.2008. "*The Judgement Power*".The Georgetown Law Journal.Vol.96,Nomor6